

## PERGERAKAN : WARGA BERDAYA DAN YOGYAKARTA YANG SUMPEK

PEMBICARA:

YOAN VALLONE – PEGIAT SEPEDA

ELANTO WIJOYONO – PEMERHATI WARISAN BUDAYA

ANDREW LUMBAN GAOL – SENIMAN JALANAN

WAWIES WISNU WISDANTIO – ARSITEK

MODERATOR – YOSHI FAJAR KRESNO MURTI

10 MEI 2013

**Moderator** : sebenarnya Jogja ke depan arahnya mau ke mana? Penting untuk melihat Jogja semangatnya mau ke mana dan ruang public dalam konteks Jogja ini bentuknya seperti apa?

**YOAN VALLONE** : Saya di sini mewakili dari sudut pandang pesepeda. Mungkin ada yang rancu dengan konsep warga berdaya, banyak yang mengira ini komunitas baru, ada yang mengira ini FPI baru. Warga berdaya ini adalah spirit bukan komunitas, setiap warga memiliki daya, mungkin selama ini saya bilang lumpul – mental njagake. Kemarin dengan spirit ini, kawan-kawan melakukan beberapa aksi yang dimulai di Oktober 2012, di mana waktu itu ada penolakan atau upaya mereduksi dari Sego Segawe di situ kawan-kawan melakukan sebuah statement ‘tanpamu sepeda tetap melaju’ untuk menunjukkan dengan atau tanpa otoritas sebenarnya masyarakat itu bisa melaju. Sedangkan semangat ini bersambut dengan aktivitas yang lain, di akhir Januari dan di awal Februari yaitu melakukan pembenahan fasilitas sepeda. Adanya hal ini sebenarnya membuat merosot semangat teman-teman, maka perlu dikembangkan lagi.

Aktivitas ini cukup menyita perhatian, banyak kerjasama dengan media untuk pembenahan ruang tunggu dan fasilitas sepeda. Akhirnya semangat keberdayaan ini bersambut dengan komunitas lain, akhirnya bergabung untuk membenahi kota bersama-sama. Memang tidak secara umum kota tetapi mengambil satu wilayah yang mana itu sample untuk harapannya agar bisa dilakukan di wilayah-wilayah lain, kita mengambil rute dari Terban melalui Mangkubimi lalu ke Kewek itu. Dalam aktivitas tersebut kita tidak hanya berbicara mengenai isu-isu sepeda tapi kita juga bicara publik secara umum. Kalau kita bicara ruang publik kita tidak bisa bicara sepotong atau sepinggal saja tetapi harus secara utuh. Karena ini publik siapapun

menggunakan, jadi kalau kita hanya membicarakan dari sudut pandang sepeda saja itu tidak akan adil. Makanya kita harus berbicara secara menyeluruh. Dalam 'merti kuto ini kita mencoba untuk nyicil, membenahi PR bersama masyarakat juga menjadi tanggung jawab pemerintah yang masih jadi persoalan. Waktu itu ada teman-teman difabel, pengamat heritage, arsitek, Taring Padi, dll. Pada waktu itu ditanya saya sendiri agak bingung menyebut komunitasnya, tetapi komitmen kami menanggalkan atribut komunitas kami dan kami melebur menjadi warga. Jadi atas nama warga Yogyakarta, tanpa menggunakan jaket atau bendera apapun dan kita benahi, gotong royong kampung.

Salah satu aktivitas dalam Merti Kuto ini adalah memutihkan jembatan kekek, kami memang tidak memutihkan semuanya karena ini adalah trigger, bukan tujuan umum, tujuan umumnya perubahan menyeluruh yang gak bisa dilakukan oleh segelintir kawan-kawan. Tetapi harus dilakukan bersama dengan semangat yang sama. Pemutihan jembatan itu dilakukan karena ada ambisius, iklan-iklan itu masih bermasalah, UU belum jelas. Bukan berarti UU belum jelas kita bisa memanfaatkan ruang publik seenaknya. Di jembatan Kewek ada background yang cukup spesifik secara sejarah, di sana mendasari sejarah bangsa. Dulu Agresi Militer Belanda tahun 49, salah satu tempat yang diduduki oleh masyarakat Jogja karena tentara dari Belanda yang mau mengokupasi jogja lagi, itu menggunakan moda transportasi kereta. Dari Solo menuju Jogja, itu dicegat dari Maguwo hingga Kewek, rel kereta dibedol. Sorotan jurnalis internasional yang waktu itu mencatat gerakan masyarakat di Jogja, tersebar sampai luar dan masyarakat internasional melihat bahwa "oh, ternyata kemarin 17 Agustus 45 tidak main-main."

Kenapa tempat yang punya latar belakang sejarah seperti ini kok malah digunakan yang tidak memiliki impact positif untuk publik. Respon yang waktu itu terjadi setelah beberapa hari, ternyata digunakan lagi oleh corporate. Akhirnya memicu gerakan lainnya yaitu Gerakan Umum Satu Maret, yang dilakukan satu maret 2013 lalu.

Apa yang melatarbelakangi aksi ini?

Pertama, perkembangan situasi dan pemanfaatan ruang Jogja yang semakin berantakan

Kedua, pemerintah diam saja. Contoh: parkir dan trotoar, penggunaan trotoar untuk ruang dagang, itu yang selalu kita lihat, tidak ada tindak lanjut yang nyata.

Ketiga, terjadi pemakluman dari masyarakat dan melazimkan kegiatan yang kurang tepat. Dilihat itu ada fase, bisa – biasa – budaya. Ini persoalan yang harus dibuka lagi agar bisa diselesaikan.

Fasilitas sepeda itu tidak terpelihara sama sekali. Pemerintah tidak memperbaiki, akhirnya kami patungan untuk membenahi.

Sekarang mengenai pesepeda, kenapa teman-teman pesepeda ini mengikuti aktivitas ini. Sebenarnya ada fenomena sepeda di jogja, ada aktivitas yang dapat memupuk kebebasan, yaitu Jogja Last Friday Night, menggunakan fondasi kebebasan untuk melakukan kegiatan bersepeda. Orang-orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, mau melakukan apapun terserah.

Dari kebebasan ini, muncul kesadaran bahwa manusia memang harus berkompromi dengan lingkungannya. Kalau kita bicara aturan, aturan itu bukan membangun kesadaran tetapi menempel kesadaran. Di dalamnya tidak ada paksaan, yang mendasari kawan-kawan memiliki ruang kebebasan, dari ruang itu muncul kesadaran kolektif dan kepekaan terhadap ruang publik.

Gerakan ini sebenarnya dipicu sikap walikota Jogja yang menggembosi semangat. Entah apa motifnya, dia mengurangi banyak agenda bersepeda.

Dalam waktu beberapa jam setelah statement itu keluar di media online, muncul desain-desain, lalu malamnya sudah tertempel di tembok-tembok. Akhirnya pemerintah kota, berkomitmen lagi untuk mendukung kegiatan bersepeda. Ini rasa solidaritas dan berdaya itu yang membuat pesepeda bisa membuat perubahan.

Perbaikan yang dilakukan oleh teman-teman, pendanaannya secara kolektif. Kita juga melakukan ekspos di media massa agar dapat dilihat oleh masyarakat luas. Dampaknya muncul inisiatif warga lain, di kali mambu di buat warga sendiri. Pemerintah melakukan audiensi menyepakati pembenahan fasilitas sepeda dan penentuan kawasan percontohan ruang publik yang nyaman, disepakati di Kota Baru.

#### **ANDREW LUMBAN GAOL :**

Tentang keterlibatan street art itu semacam utang kita kepada publik, balas budi bahwa kita orang biasa yang hamper yang tidak memiliki kekuatan birokrasi atau kekuatan modal dapat memberikan sesuatu yang inspiratif. Kegiatan Merti Kuto merupakan sample dan demonstrasi dari berdayanya setiap individu yang memiliki kepedulian terhadap lingkungannya. Banyak masyarakat yang mengira tidak dapat melakukan apapun untuk sebuah perubahan kecil, tapi dengan aksi ini mendemonstrasikan semua orang bisa membuat sesuatu yang sangat inspiratif. Keterlibatan kita tanpa bawa nama, semuanya merasa punya tanggung jawab yang sama.

Jauh sebelum Merti Kuto dan Serangan Umum sebenarnya sudah ada gerakan-gerakan sporadis dari street art, merespon keberadaan gejala komersialisasi jembatan Kewek. Waktu itu sekitar bulan Desember 2012, sudah melakukan penyerangan sporadis terhadap kegiatan tersebut. Iklan itu sama sekali tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar. Di situ kita mulai sadar, mengenai komersialisasi ruang publik.

#### **ANDREW LUMBAN GAOL**

Kita sebagai masyarakat, individu dapat juga mengkritisi dan membentuk kota kita menurut standar kemanusiaan kita sendiri bukan standar kemanusiaan pemilik modal atau pemerintah. Inilah yang dikerjakan warga berdaya.

## **WAWIES WISNU WISDANTIO:**

Ada sesuatu di diri para pekerja yang salah di kota Yogyakarta. Masih ramahkah kota, khususnya Yogyakarta. Kalau melihat kota sendiri merupakan ruang kolektif, di mana semua orang memiliki satu tempat untuk beraktifitas bersama tanpa melihat dia berbendera apa, di situ ada sistem komunikasi sosial, sistem interaksi.

Karakter ruang publik : partisipasi, bahasa, akal sehat. Di sini ada penyatuan kepentingan kemudian menjadi permasalahan kepentingan sehingga ada pertanyaan 'masih ada tidak ruang publik itu ?' Penataan ruang sendiri, proses perencanaan dan pengendalian, ada sesuatu yang hilang. Sekilas mengenai ruang, di sini tidak ditemukan ruang-ruang publik yang ada ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Jadi ruang publik itu sendiri kurang terdefiniskan di penataan kota. Mungkin itu terlalu cair sehingga bisa dimasukkan ke dalam ruang sirkulasi ketika berada di trotoar, dll. Sehingga tidak ada peraturan yang mengikat ruang publik itu seperti apa. Pada akhirnya, sering terjadi konflik; penggunaan, golongan siapa yang bisa menggunakan. Pembatasan ruang hijau yang hilang mengaburkan yang menimbulkan konflik kekuatan mesin, kayuan kaki, kemudian ada permainan pasar. Ada juga konflik cagar budaya atau bukan.

Di sini terlihat ada pergeseran nilai pada ruang publik. Di sini sendiri nilai ruang publik mulai digeser. Tergeser oleh berbagai hal. Ini menjadi sangat aneh ketika taman kota malah dipagari. Pada akhirnya penguasaan ruang publik memiliki otoritas tertentu. Kebijakan siapa yang buat? Kalau kebijakan dibuat tanpa adanya keberberpihakan terhadap masyarakat, pada akhirnya ruang publik itu akan digeser berdasar kepentingan otoritas.

Penguasaan ruang publik itu digunakan untuk dijual. Pemahaman itu tidak lagi di kota tetapi sudah sampai di lingkup pedesaan. Yang jelas secara infrastruktur di kota lebih cepat. Ini ada paham yang berbeda ruang itu menjadi komoditi, bukan tempat berbudaya lagi.

Ada konflik penggunaan ruang, di sini pada akhirnya kelompok 'informal' berhadapan dengan kelompok 'informal' lain karena kurang tegasnya kebijakan. Ketika ada perda, dilarang pkl, kemudian tidak ada penyediaan ruang dikhususkan untuk orang-orang pkl itu. Salah satu contoh konflik di titik nol, ada beberapa desain yang pada akhirnya dibuat meminggirkan yang menggunakan fasilitas ruang publik untuk kegiatan sehari-hari misalnya tidur.

Konflik pengolahan ruang, pada akhirnya lebih penting mana, antara fungsi pejalan kaki atau yang lain. Peraturan sendiri, kebijakan penataan itu berlaku ketika sudah ditetapkan dalam skala nasional. Itu harus diterapkan lagi di wilayah provinsi kemudian di kabupaten. Pertanyaannya, apakah nasional tahu masalah yang ada di tingkat lokal? Apakah kemudian isu yang di Jogja sama dengan yang di Aceh? Ini yang menjadi sedikit pengaburan tujuan.

Pada akhirnya ada pengelolaan perijinan. Ada pemberlakuan sangsi pidana. Pelaksanaan sistem hukum siapa yang mengurus? Pada akhirnya, ketika ruang-ruang tidak terfasilitasi, muncul sebuah gerakan dari masyarakat. Masyarakat sendiri yang menentukan. Keruwetan Jogja itu

sendiri, menurut saya, salah satu bentuk proses kebebasan masyarakat Jogja untuk berkreasi. Misal, kenapa Jogja itu tumbuh subur dalam bentuk PKL, burjo, karena orang Jogja itu punya kecenderungan untuk mampir (tuku wedang sek). Dari situ muncul kelompok-kelompok yang menjawab kebutuhan seperti itu.

Gerakan yang kemarin dilakukan menjadi sebuah tempat akhirnya masyarakat memiliki kebutuhan termediasi di ruang publik. Ruang sebagai tempat untuk berbudaya, ruang sebagai sebuah identitas. Pada akhirnya dikembalikan lagi partisipatori masyarakatnya, memang dibutuhkan gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok tanpa bendera untuk menghidupkan kembali kehidupan berkomunitas secara publik di Yogyakarta.

## **ELANTO WIJOYONO**

Sebenarnya kalau kita mencoba membicarakan hal ini, yang paling mudah adalah kita membawa satu ikon untuk mengerucutkan kepada kompleksitas di masalah kita. Jembatan Kewek menjadi sebuah ikon untuk menceritakan bahwa kota itu memiliki kompleksitas tetapi kemudian kita coba simbolisasikan di Jembatan Kewek. Di situ kita bisa melihat beberapa wajah Kewek di masa lalu, tetapi kemudian pada suatu saat muncul pada wajah yang baru, tetapi pesan yang memiliki kepenitngan yang komersial. Kemudian warga kota memiliki sikap yang berbeda. Kemudian kita putihkan saja, kita bersihkan saja.

Kita mengambil kata 'merti' bagaimana kita membersihkan kembali lingkungan kita, sebenarnya lingkungan sudah memberikan hal yang baik, maka kita harus memberikan hal yang baik juga. Ini biasa dalam konteks pedesaan, lalu kita bawa dalam konteks perkotaan. Di konteks perkotaan yang kita sebut permasalahan itu banyak sekali, sampah visual, ruang visual. Sehingga kita menganggap kota itu perlu di 'ruwat'.

Konteks sejarah di Jembatan Kewek ada beberapa lapis. Misal pada Serangan Umum 1 Maret 49, tetapi untuk bisa membawa peristiwa-peristiwa itu, bisa kita tarik lebih lanjut lagi ke belakang. Jadi cara paling gampang, ini bangunan punya sejarah atau tidak, kita melihat umurnya dari foto, gambar. Kalau infrastruktur di Jawa sudah banyak didokumentasikan. Jembatan Kewek sudah ada sejak abad 20. Jembatan Kewek dengan berbagai ketentuannya sudah bisa masuk ke dalam warisan itu sendiri.

Menariknya, Jembatan Kewek itu tipe struktur bangunan yang merupakan gabungan jembatan kereta api dan jembatan untuk jalan raya. Jembatan yang melintasi sungai itu jembatan. Jembatan di atas jalan itu piaduk. Jembatan Kewek itu gabungan, kita bisa melihat itu di Surabaya.

Kalau bicara kesejarahan sudah diakui. Walaupun kalau kita lihat pada daftar bangunan heritages di Jogja, Jembatan Kewek itu belum ditetapkan sebagai bangunan bangunan cagar budaya. Tetapi jembatan ini sudah diusulkan sebagai bangunan cagar budaya. Jembatan ini dikuasai PT KAI sebagai asetnya. Kalau bicara PT KAI mereka sudah cukup serius ketika bicara

pelestarian asset-aset yang mereka miliki. Tahun 2009, ada unit khusus dari mereka yang mengurus pelestarian asset-aset mereka. Semuanya mendapatkan penanganan yang baik. Tetapi untuk kasus Jembatan Kewek ini PT KAI tidak pernah muncul.

Di data base provinsi, ada kawasan cagar budaya yang masuk ke dalam kawasan cagar budaya Kota Baru. Sehingga itu kalau kita bicara tingkat heritage sebenarnya perdebatannya sudah selesai. Apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Dalam bahasa aturan, ketika itu tidak dilarang berarti boleh dilakukan. Perangkat aturan yang ada itu belum cukup kuat. Biasanya antar perda itu saling bertubrukan.

Gerakan warga berdaya, ada audiensi dengan walikota, 4 maret sudah ada surat resmi. Tetapi sampai sekarang belum ada forum yang kita harapkan. Bukannya dibuatkan forum resmi, kita malah diundang makan malam. Progresnya masih mandek. Di sisi lain kota itu punya ruang sebagai ruang intelektual, tentang peradaban, tentang kota.

## **ELANTO WIJOYONO**

Ada kelompok yang mencoba berfikir idealis dengan kelompok yang pragmatis pada beberapa bagian ini bisa bertemu. Pada beberapa hal kelompok kepentingan ini tidak bisa bertemu. Pada soal heritage, ada kelompok yang tidak menerima karena konservasi itu biayanya lebih mahal. Sebuah kota yang memiliki kesiapan dalam hal konservasi itu tingkatnya lebih tinggi dibanding peradaban yang di mana kita masih mikir makan.

Di sini ada yang menjadi refleksi kami. Kita dibenturkan dengan pihak pengiklan. Pihak ini tidak langsung dengan corporate selulurnya, mereka memiliki tim lain. Dengan mudah kelompok ini bilang, kalau mereka sudah dirugikan dengan pihak pembersihan jembatan kewek. Karena mereka telah memiliki ijin, kontrak setahun, mereka harus bayar kompensasi dll. Ketika dilakukan di lapangan kita tidak melulu mendapatkan hasil yang diharapkan. Dalam UU cagar budaya, tiap orang punya hak untuk terlibat dalam pelestarian, tidak ada seorangpun yang bisa menghalangi.

Bagaimana ruang publik seharusnya dikelola? Saya punya pandangan, seharusnya dikelola tidak merugikan siapa pun. Kalau misalnya jembatan kewek itu putih bersih tidak merugikan siapa pun. Ketika ada sekelompok pihak yang mencari keuntungan di situ bisa merugikan sebagian orang. Kita harus punya strategi gimana memperjuangkan ide-ide ideal tersebut.

Ketika ada nilai baru yang coba ditawarkan tidak mesti langsung diterima. Harus ada strategi komunikasi yang tepat, untuk bisa menjangkau kelompok-kelompok (kelompok belum paham dan kelompok tidak mau tahu). Walaupun proses yang cukup panjang tetapi harus kita lakukan. Ada beberapa media yang bisa dilakukan, sebenarnya yang paling krusial, yang paling efektif, melalui mekanisme perencanaan reguler. Biasanya yang terlibat adalah warga setempat. Tetapi perencanaan dari bawah ke atas biasanya berbenturan di dinas-dinas.

Walaupun kita di jembatan kewek ternyata di balik itu banyak persoalan yang kita kupas satu-satu. Jembatan kewek menjadi barometer.

## **SESI TANYA JAWAB:**

**Riyadi** : di sini saya mewakili komunitas forum modal nekat (formonek), forum alumni SMA 17. Apa yang kita lakukan, di ranah atas masalah sengketa sidang banding, masalah di tengah menangkap orang yang mengaku ahli waris, belum terlaksana dengan baik. Polda sendiri butuh 4 mill untuk menangkap orang itu. Di ranah bawah membantu guru-guru yang mengajak dan murid-murid dari teror preman. Sudah ada tiga preman yang kita negosiasikan tidak mengeksekusi sekolah. Saya sebagai warga Jogja tertarik dengan gerakan yang dilakukan teman-teman. Kelanjutannya seperti apa untuk ngopeni inisiatif dari masyarakat untuk cita-cita kota yang layak manusia. Usaha teman-teman juga bagus untuk mengecat ruang tunggu sepeda, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melanjutkan.

**BINTANG** : Apa yang membedakan penggunaan Jembatan Kewek sebagai cagar budaya dengan provider tersebut. Apa karena komersialisasi sehingga dihapus? Kadang-kadang visual street art kurang dimengerti oleh masyarakat.

**Dilla** : setiap kali saya jalan di kota jogja, saya melihat iklan provider saya melihat bahwa gambarnya termasuk bagus dalam visual, terus saya pikir, oh mereka sudah biasa bikin mural. Kelihatannya cukup professional. Ketika mereka bikin pasti malam, teman street art juga kalau buat malam. Pernah tidak bertemu lalu ada komunikasi?

## **JAWABAN:**

**ANDREW LUMBAN GAOL** Respon teman-teman street art dari kasus Kewek, secara pribadi dan dari obrolan sebenarnya sangat membuka kanal-kanal diskusi, forum komunikasi. Jembatan Kewek akan kita perlakukan seperti apa, kita masih membuka berbagai kemungkinan. Kalau kita setuju kalau jembatan kewek untuk berekspresi lagi monggo. Yang menjadi masalah, kenapa jembatan sebesar itu diklaim sepihak oleh label tertentu, kita bayar pajak untuk merawat, kita bayar petugas. Tetapi dijual untuk iklan. Yang paling tertampar untuk sreet art; ini rumahmu, kok mau rumahmu dijadikan seperti ini. Kita kemarin membuat beberapa provokasi, Jembatan Kewek itu tempat terbuka untuk semua orang.

Mereka yang mengerjakan mural kewek adalah teman kita, yang pada teknisnya mereka juga merasa dirugikan karena ada semacam kebohongan. Sebenarnya saya juga baru tahu bahwa jembatan tersebut merupakan cagar budaya. Kita kepada teman-teman, kita tidak menyalahkan mereka yang menggarap gambarnya, yang kita salahkan adalah konflik-konflik. Mereka korban kita juga korban. Jembatan kewek itu menjadi symbol pergerakan kita. Kita mengharapkan bisa membangun semangat di daerah-daerah lain.

Kalau kita banyak prasana, kita bisa ngebom mural-mural itu. Kita kan tidak mau dianggap sebagai polisi street art. Harapannya orang lain melihat itu sebagai bentuk komunikasi, mungkin ini sebagai gerakan hore-hore, bagaimana kita merawat kota.

### **YOAN VALLONE**

Mengenai keberlanjutan, jembatan tersebut sudah digunakan lagi untuk komersil. Saat ini sedang ada pematangan raperda, pelarangan iklan komersil di tembok umum dan tembok pribadi. Dengan adanya aturan ini, semestinya kita tidak akan lihat lagi penggunaan tembok-tembok sebagai iklan.

Yang dilakukan ini adalah simbol, bidikannya adalah adanya aturan yang jelas. Ketika sudah ada aturan yang diimbangi penegakkannya kita akan dapat melihat wajah Jogja yang akan berubah. Rasanya Jogja membosankan karena yang dilihat tendesius sekali. Suatu tempat menjadi tempat untuk kepentingan pribadi. Harapannya ada aturan yang jelas, di mana eksploitasi terhadap masyarakat dapat dikurangi. Tindak lanjutnya kami sedang mengawal raperda tadi.

### **ELANTO WIJOYONO:**

Ketika masyarakat harus turun sendiri, menggantikan peran negara itu kebangetan sebenarnya.

Saya teringat apa yang dilakukan teman-teman Apotik Komik, ada salah satu tempat yang menarik yang direspon mereka. Salah satunya gardu listrik di Kota Baru. Kenapa gardu listrik karena sebenarnya teman-teman paham itu adalah cagar budaya. Ada kekuatan teman-teman street art menemukan ruang-ruang terabaikan kemudian dihidupkan. Sebelum kejadian ini, jembatan kekek bisa dilihat cukup cantik dari gambar-gambar yang dibuat temen-temen. Namun, ketika sudah diklaim menjadi salah satu pihak. Itu menghancurkan semangat keterbukaan.

Kalau aturan pada pengelolaan cagar budaya, kalau di aturan secara hukum ada kaidah konservasi, harus memenuhi keaslian, kesamaan material. Kalau dalam ranah ilmu arkeologi, memang sistem pengelolaan yang di Indonesia masih sangat dikelola oleh pemerintah. Padahal pada ilmu arkeologi yang paling terbaru pemaknaan-pemaknaan yang muncul dari masyarakat itu sebenarnya ada terbuka. Jadi ruang-ruang yang punya cagar budaya itu, selama itu tidak merusak itu seharusnya mendapatkan tempat. Di Indonesia masih tarik ulur.

Misalnya alkid, dulu tempat latihan prajurit, tetapi ketika mau dibuat seperti itu akan sepi. Namun, dengan pemaknaan baru bisa menjadi lebih ramai. Walaupun sekarang lebih tidak terkendali. Banyak yang punya potensi yang hampir mati bisa dihidupkan dengan cara-cara seperti tadi.



## **ELANTO WIJOYONO**

Apa yang kita lakukan di jembatan kekek memang agak berbeda dengan kasus lain. Tapi rata-rata bangunan atau situs itu masuk ke dalam hak milik perseorangan atau lembaga. Beda cerita ketika kita menghadapi situs atau cagar budaya yang dikelola pemerintah. Biasanya lebih rumit ketika dimiliki oleh lembaga.

YAP square itu cagar budaya tingkat nasional. Ada rencana membuat kompleks ruko itu, saya tidak tahu bagaimana itu ada revisi ada keputusan menteri. Yang membuat pembangunan ruko tersebut menjadi terlaksana dan pemiliknya kraton. Bahwa memang harus banyak cara dan strategi. Paling tidak kalau kita ingin memperjuangkan kota, paling tidak kita bisa menyelamatkan publik yang dikelola oleh negara. Stasiun, jembatan kekek, museum. Kita bisa sama-sama awasi.

## **WAWIES WISNU WISDANTIO**

Sebetulnya salah satu yang kita lihat, itu adalah ruang publik terjadi diskusi antar-seniman. Ketika ruang berproses bersama itu dimiliki swasta yang menjadi media untuk menjual sesuatu. Akhirnya ruang-ruang untuk saling merespon itu menjadi hilang. Sama-sama ruang public cth pantai, sebelum garis batas bisa dinikmati bersama-sama, ketika dibangun sebuah hotel kita tidak bisa lagi menggunakan. Ada sebuah kemiripan pola. Menjadi sebuah penyakit yang cukup kronis.

Ada proses yang tidak jelas, dari pemangku kebijakan mengatur ini semua, tidak ada kejelasan, tidak ada kejelasan. Harusnya mereka bisa menelurkannya dalam bentuk peraturan.

### **Moderator:**

Apa yang tampak di jembatan kekek berasal dari persoalan-persoalan yang tidak tampak. Ada ketidakadilan kota, ada moderator yang hilang dari pemerintah, ada ketidaksediaan ruang, saling bertengkar. Saya kira ini proses yang sehat selama ini dijaga tidak dikomersialisasi.

Saya menangkap, bahwa warga berdaya ini menimbulkan inspirasi yang bagus karena memiliki impact yang cukup lumayan karena ada momentumnya, semua pihak merasa kena dan bereaksi terhadapnya. Itu momen yang langka. Ini proses yang akan diserahkan kepada proses alam. Ini yang sebenarnya memancing perkara yang cukup lebih dalam mengenai gagasan ruang publik, gagasan ruang kota, dsb.

Kira-kira jogja sendiri punya persoalan apa yang kira-kira menjadi kecemasan bersama.

### **Penanggap:**

Saya merasa kaget, ada warga berdaya dengan gerakannya. Ternyata itu pelakunya juga street art. Menurut saya, ketika ada gerakan seperti itu dengan menetralkan jembatan kekek, itu pasti ada imitasi lainnya, umpamanya akhirnya banyak warga yang sadar bahwa lingkungannya sudah banyak dikuasai street artist. Sebenarnya tidak ada bedanya itu menempel di cagar budaya. Maksud saya, ketika teman-teman yang merasa jembatan kekek itu dikuasai oleh satu pihak, juga harus siap menerima bersih-bersih street art. Pasti itu ada implikasinya, itu tidak ada bedanya.

Dalam bayangan saya, hukum di publik space itu ya seperti itu, siapa yang kuat silakan saja. Mereka seperti berkhotbah, street artis juga berkhotbah, ada juga yang hanya ingin eksis. Apa bedanya dengan street artis. Padangan saya, dikat aja, dibom aja. Kalau di jalan kalau sudah vandal ya vandal aja. Sebenarnya menjadi lucu kalau kita melawan yang di jembatan kekek saja. Karena saya juga tertarik juga dengan karya-karya di jalan. Kalau hukumnya rimba ya langsung saja.

### **YOAN VALLONE**

Saya sangat sepekat dengan poin di mana, ini adalah masalah bareng.

Ada poin yang gak antagois ada yang perlu diluruskan, ini ada sebab akibat.

Kita berfikir, kita butuh monument yang kongkrit di sini. Kita tidak bisa lagi harapkan diskusi dalam bentuk bicara. Untuk memulainya, untuk nanti kelanjutannya jelas. Cuma untuk memulainya kita butuh deklarasi yang jelas, itu bukan sebuah penghakiman, tetapi kita juga harus melihat sebetulnya ruang ini sebenarnya digunakan untuk apa. Dengan banyak latar belakang yang banyak tadi.

Yang dilakukan kawan-kawan kita sudah cukup dengan memberikan statemen seperti itu, isu tersebut sudah berkembang. Sampai hari ini pun masih banyak orang yang membahas tata ruang kota. Public awareness semakin meningkat. Kita membuat deklarasi yang nyata, ini justru yang diharapkan.

### **ELANTO WIJOYONO**

Kota itu sebetulnya adalah sebuah pengalaman baru untuk peradaban kita di desa. Mungkin sampai sekarang itu pun ruang publik itu tidak ada di desa adanya ruang bersama yang dikelola. Ruang itu tidak harus milik negara tetapi bisa menjadi milik privat tetapi bisa digunakan bersama berdasar kesepakatan, berbagi peran sehingga tidak merugikan. Itu di desa bisa dijalankan. Tetapi di kota kita punya mekanisme yang agak berbeda bahkan ruang-ruang demokrasiya berbeda. Sebenarnya yang terjadi di jembatan kekek terkait dengan proses perencanaan tadi.

Kemudian, ruang-ruang seperti mertu kuto, ruang-ruang yang memang sengaja diadakan untuk mewadahi partisipasi yang selama ini belum terwadahi dalam perencanaan ruang yang formal. Ketika kita coba dengan mertu kuto, itu sebagian kaum muda. Sebenarnya kota kita membutuhkan ruang diskusi bagi warga yang lintas kepentingan apapun yang belum terwadahi.

Ke depan kita akan melihat perkembangan, bentuk respon seperti apa bisa kita lihat bareng-bareng. Jadi inti dari ini jembatan kekek terputihkan atau tidak, jumlah massa banyak atau sedikit itu adalah proses bukan tujuan. Ini adalah cara yang lain, apakah ini bisa memengaruhi kebijakan atau peraturan. Sejauh apa efektivitasnya. Ketika ini tidak ada salurannya bisa parsial bisa saling serang.

Di sini jembatan kekek itu sendiri, kita sepakat. Jembatan kekek ini kita bawa ke arah positif. Kita berusaha agar kepentingan masing-masing dapat terpenuhi meskipun tidak bisa memuaskan semuanya. Kita punya momentum itu, kalau kita sepakat ada negara ya udah kita kelola bareng-bareng yang sekarang kita saling terbentur akibat tidak ada ketegasan hukum atau ketiadaan negara. Walaupun di titik ini kita tidak sepakat untuk menggantikan peran negara. Jangan sampai masyarakat selalu menggantikan peran negara. Jembatan kekek untuk menunjukkan puncak permasalahan yang belum selesai.

### **WAWIES WISNU WISDANTIO**

Di sini menjadi sebuah momentum, jogja itu tidak hanya punya satu PR tentang penataan ruang. Sebenarnya Jogja itu masih memiliki PR yang banyak sekali misalnya bencana. Ini menjadi sebuah momen, penataan ruang ini bukan menjadi milik segelintir orang, tetapi menjadi PR bersama. Harusnya ada wahana bagi masyarakat agar kita bisa bergerak bersama.

### **ANDREW LUMBAN GAOL**

Masalah street art memang banyak seniman yang mengklaim ini tempat saya. Ini bisa menjadi kritik bagi street art, mereka bukan satu-satunya orang boleh menggunakan tempat publik tetapi semua orang bisa menggunakan itu. Kenapa kita tidak membomber saja secara individu? Sudah, itu sudah kita lakukan, tapi sekali lagi kita tidak ingin menunjukkan hal itu. Ini gerakan bareng-bareng. Kita harus melihat permasalahan yang kita hadapi ini bukan seperti yang di Amerika. Tetapi lebih real, masalah yang kita hadapi.

#### **Moderator**

Satu hal yang menarik bagi saya, Jogja berdaya ini memberi satu momentum, satu pengertian baru bahwa gagasan kewargaan. Dulunya berbasis pada hak dan kewajiban. Menurut saya, jogja berdaya ini memberi terobosan baru, dia keluar dari konsepsi kewargaan antara hak dan kewajiban, meskipun iya, tapi itu beyond, sudah dilampaui. Mereka menawari suatu nilai dan kerja. Ini kita butuhkan pada saat ini, jogja semakin sumpek dengan kreativitas. Ke depan semakin menakutkan kalau saling makan-makan. Tidak hanya ruang, tetapi orang-orangnya sendiri.